

BAB I. PENDAHULUAN

TITIK AWAL MENGGALI REALITAS “SUSTAINABILITY”

*Hanya bila pohon terakhir telah tumbang ditebang
Hanya bila tetes air sungai terakhir telah teracuni
Hanya bila ikan terakhir telah mati ditangkap
Hanya bila udara tercemar tak bisa lagi untuk bernafas
Barulah kita sadar bahwa UANG di tangan tidak bisa dimakan*
(Deputi Bidang Pembinaan Sarana Teknis dan Peningkatan Kapasitas
Kementerian Negara Lingkungan Hidup, 2007)

1.1 Latar Belakang

Tanpa disadari bumi kita terus menerus berputar dengan tidak bergeser sedikitpun kecepatannya, membuat hari-hari terus berlalu membawa umat manusia menuju peradaban dunia ke ujung senja. Bumi ini seakan-akan sudah lelah mengiringi langkah-langkah perjalanan peradaban dunia akibat peristiwa-peristiwa yang telah banyak memeras keringat, darah, dan tetesan air mata sang ibu pertiwi, serta menghantarkan umat manusia pada krisis multidimensi. Krisis finansial (ekonomi) yang terjadi di Amerika Serikat, krisis kemanusiaan (sosial) yang melibatkan Israel dan Palestina dan juga krisis lingkungan di seluruh pelosok bumi.

Krisis finansial (ekonomi) yang terjadi di jantung kapitalis Amerika Serikat, ditandai oleh rontoknya beberapa keuangan raksasa dunia. Krisis finansial tersebut kemudian menjelma menjadi krisis global yang berhasil meruntuhkan sebagian besar bursa utama dunia, baik di Amerika, Eropa, maupun Asia. Sementara itu, krisis kemanusiaan (sosial) yang terjadi di Jalur Gaza ditandai dengan adanya serangan Israel secara membabi buta terhadap rakyat Palestina. Serangan tersebut sungguh berada di luar batas-batas kemanusiaan, di tengah kehidupan umat manusia yang semakin beradab, masih saja ada pihak-pihak yang sanggup melakukan kebiadaban.

Tidak hanya krisis finansial dan krisis kemanusiaan saja, krisis lingkungan juga terjadi, mengakibatkan perubahan-perubahan yang dialami bumi. Perubahan (Penipisan lapisan ozon, peningkatan suhu udara menjadi lebih panas, penipisan lapisan es di kutub, permukaan air laut naik, banjir, alih fungsi hutan, polusi, bertambahnya jenis penyakit baru). Perusahaan menjadi tidak segan-segan melakukan eksploitasi sumber-sumber alam dan mengeksploitasi masyarakat secara tidak terkendali sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan alam yang pada akhirnya mengganggu kehidupan manusia (Anggraini, 2006: 2). Dapat dibayangkan, dengan krisis multidimensi di atas bayangkan apa yang akan terjadi pada generasi berikutnya.

Berbagai persoalan ini kemudian memicu semakin derasnya tuntutan masyarakat agar perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap dampak sosial dan lingkungan yang timbul sebagai konsekuensi dari aktivitas bisnisnya. Adanya tuntutan ini terutama disebabkan karena masyarakat sudah mulai menyadari pentingnya melestarikan lingkungan dan kepedulian sosial yang disebabkan oleh kerusakan akibat aktivitas-aktivitas organisasi bisnis, kemunculan akuntansi sosial dan lingkungan menyadarkan masyarakat tidak lagi hanya menuntut produk barang/ jasa hasil organisasi yang bisa berguna untuk kehidupan saja. Masyarakat juga menjadi sadar akan keinginan organisasi-organisasi bisnis untuk memperhatikan kelestarian lingkungan dan peduli sosial.

Kondisi ini kemudian mendorong semakin mengemukanya isu akuntansi pertanggungjawaban sosial dan lingkungan perusahaan (yang kita ketahui juga sebagai akuntansi sosial, akuntansi lingkungan, *corporate social reporting*, *corporate social responsibility reporting*, *non-financial reporting*, atau *sustainability accounting*). Akuntansi pertanggungjawaban sosial dan lingkungan perusahaan dalam praktik di lapangan umumnya akan dituangkan dalam bentuk laporan tahunan atau laporan sosial terpisah yang disebut sebagai *Sustainability*

Report melalui mekanisme akuntansi pertanggungjawaban sosial. *Sustainability report* menurut *World Business Council for Sustainable Development* bisa didefinisikan sebagai laporan publik yang memberikan gambaran posisi dan aktivitas perusahaan pada aspek ekonomi, lingkungan dan sosial kepada *stakeholder* internal dan eksternal (WBCSD,2002:7). *Sustainability* (keberlanjutan) adalah keseimbangan antara *people*, *planet* dan *profit* yang dikenal dengan konsep *Tripple Bottom Line* (TBL), Perusahaan harus bertanggung jawab terhadap dampak positif atau negatif yang ditimbulkan oleh aspek ekonomi, sosial dan lingkungan (Elkington, 1997).

Pada level internasional, *United Nation World Commission on Environment and Development* (WCED, 1987) dengan judul *Our Common Future* yang lebih dikenal dengan *Brundland Report* mengajak semua bangsa di dunia untuk mengintegrasikan spirit *sustainability* ke dalam tujuan-tujuan nasionalnya. Integrasi tersebut dapat dilakukan dengan mengadopsi prinsip-prinsip *sustainability* sebagai panduan bagi kebijakan-kebijakan nasional yang dijalankan. *Brundland Report* ini telah menginspirasi munculnya kepedulian akan regulasi-regulasi ataupun standar-standar di dunia untuk kegiatan tentang kepedulian sosial dan lingkungan. Ajakan tersebut menegaskan peran penting yang harus dimainkan oleh negara dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip *sustainability* ke dalam tujuan-tujuan pembangunannya. Mengingat demikian pentingnya agenda tersebut, maka ajakan WCED perlu ditegaskan melalui *Johannesburg Declaration on Sustainable Development* (WSSD, 2002:1)

Accordingly, we assume a collective responsibility to advance and strengthen the interdependent and mutually reinforcing pillars of sustainable economic, social, and environmental protection, at the local, national, regional and global levels.

Sebenarnya telah banyak perusahaan yang menerapkan barbagai standar Internasional mengenai pelaporan sosial dan lingkungan sebagai upaya

untuk menunjukkan bahwa bisnis mereka bertanggung jawab (Daniri, 2008). Berbagai standar yang digunakan sebagai landasan untuk mengimplementasikan pertanggung jawaban sosial dan lingkungan tersebut, antara lain:

- a. *Global Reporting Initiative's (GRI)*, adalah panduan pelaporan perusahaan untuk mendukung pembangunan berkesinambungan yang digagas oleh PBB lewat *Coalition for Environmentally Responsible Economies (CERES)* dan UNEP pada tahun 1997.
- b. *Accountability's (AA1000) standard*, adalah panduan pelaporan perusahaan yang berdasar pada prinsip "*Triple Bottom Line*" (*profit, people, planet*) yang digagas oleh John Elkington pada tahun 1998.
- c. *Social Accountability International's SA8000's Standard*
- d. *ISO 14000 Environmental Management Standard*.
- e. *ISO 26000 Guidance Standard on Social Responsibility*.

Penelitian ini menggunakan standar GRI karena banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan berbagai sektor, GRI mudah diaplikasikan, mudah dipahami, dan menyediakan banyak pengukuran-pengukuran kinerja sosial dan lingkungan. Program GRI ini dibentuk untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan dan pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan, sehingga dapat dibandingkan, serta dapat dievaluasi. GRI itu sendiri merupakan kerangka yang dikembangkan oleh organisasi non profit, perusahaan swasta, para akuntan, dan serikat buruh di Amerika.

Indikator kinerja di dalam GRI dibagi menjadi 3 komponen, yaitu ekonomi, lingkungan hidup dan sosial yang mencakup hak asasi manusia, praktik ketenagakerjaan dan lingkungan kerja, tanggung jawab produk, dan masyarakat (www.globalreporting.org). Dari segi kepentingan pengungkapan, indikator tersebut terdiri dari indikator inti (*core*) dan tambahan (*add*). Sebagai contoh, indikator kinerja ekonomi terdiri dari 14 indikator, 12 indikator inti dan 2 indikator

tambahan. Total indikator kinerja mencapai 97 indikator, terdiri dari 14 indikator ekonomi, 33 indikator lingkungan hidup, dan 50 indikator sosial.

Struktur *sustainability report* versi GRI berbeda dengan laporan keuangan. Laporan keuangan terdiri dari beberapa laporan (Laporan posisi keuangan, Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, Laporan perubahan ekuitas, Laporan arus kas) yang didukung oleh catatan atas laporan keuangan serta Informasi komparatif (PSAK, 2013). Pembaca laporan keuangan dapat memfokuskan evaluasi kinerja pada laporan-laporan tersebut dengan mengacu pada catatan atas laporan keuangan untuk informasi lebih rinci dan tambahan. Bagi pemilik modal informasi dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, khususnya laba bersih dapat dijadikan indikator utama dalam menilai kinerja perusahaan, sedangkan laporan posisi keuangan memberikan informasi mengenai aset dan kewajiban perusahaan. Pada *sustainability report* tidak ada laporan seperti pada laporan keuangan, yang ada adalah sejumlah indikator seperti yang telah dijelaskan di awal.

Jika ditilik secara historis, praktik pelaporan CSR di Indonesia dapat dikatakan telah melalui proses evolusi yang cukup panjang. Pada awalnya, praktik pelaporan CSR yang dilakukan perusahaan bersifat sukarela (*voluntary*), belum diaudit (*unaudited*), dan tidak dipengaruhi oleh peraturan tertentu (*unregulated*). Di dalam hal ini, perusahaan berhak memilih bentuk pelaporan informasi sosial dan lingkungan yang sesuai dengan kompleksitas organisasinya, karena belum diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dikeluarkan oleh IAI (Anggraini, 2006: 3).

Namun dalam perkembangan selanjutnya, seiring dengan dikeluarkannya berbagai regulasi terkait CSR, maka tanggung jawab sosial dan lingkungan menjadi wajib untuk dilaksanakan dan dilaporkan oleh perusahaan (bersifat *mandatory*) melalui praktik *sustainability report*. Pelaporan non keuangan secara

umum telah diakomodasi dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). PSAK No.1 Tahun 2013 menyatakan tentang penyajian laporan keuangan dinyatakan bahwa:

Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*), khususnya bagi industri di mana lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting.

Isu *sustainability reporting* bagi sektor privat tampaknya begitu cepat direspon oleh pemerintah melalui penerbitan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa Perseroan Terbatas yang menjalankan usaha di bidang dan/atau bersangkutan dengan sumber daya alam bersifat wajib (*mandatory*) menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan (pasal 74 ayat 1). Dalam perbankan milik pemerintah juga telah memiliki Undang-Undang lebih terperinci untuk kegiatan tanggungjawab sosial perusahaan, yaitu Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. Per-05/MBU/2007 tentang Program Bina Lingkungan (PKBL). Peraturan ini mengatur lebih detail mengenai pelaksanaan program tanggungjawab sosial perusahaan yang dilakukan oleh BUMN termasuk besaran prosentase yang harus disisihkan dari laba perusahaan untuk kegiatan tanggungjawab sosial perusahaan tersebut.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, melalui Keputusan Ketua Bapepam dan LK: Kep-431/BL/2012 tanggal 1 Agustus 2012, pada penyampaian Laporan Tahunan yang harus berisi laporan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan seperti Laporan Keberlanjutan yang telah diungkapkan dalam Peraturan Nomor X.K.6:

Emiten atau Perusahaan Publik dapat mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1) pada laporan tahunan atau laporan tersendiri yang disampaikan bersamaan dengan laporan tahunan kepada Bapepam dan LK, seperti laporan keberlanjutan

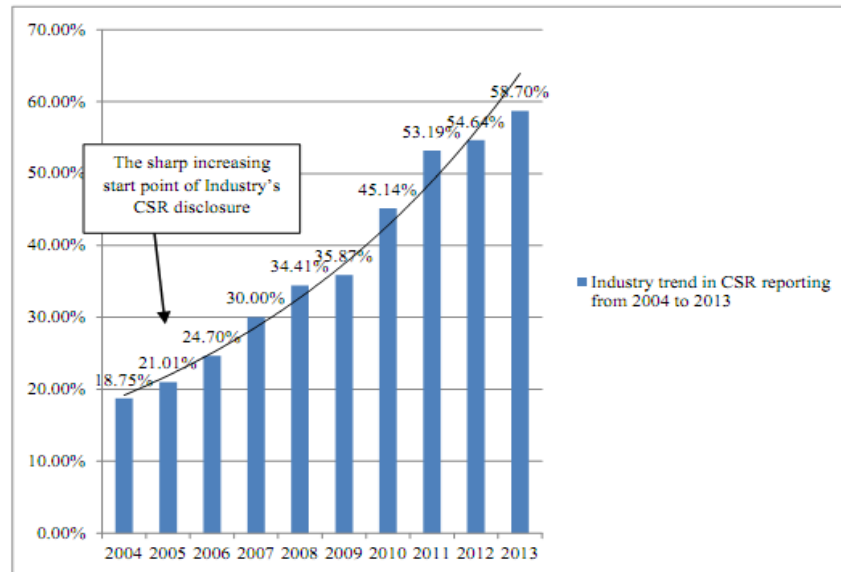
(*sustainability report*) atau laporan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility report*).

Demikian juga, UU No.25 tahun 2007 tentang Penanaman modal menyebutkan bahwa penanam modal didasarkan pada asas keberlanjutan dan asas berwawasan lingkungan. Hal ini menunjukkan adanya kepedulian pemerintah terhadap pembangunan berkelanjutan yang direalisasikan melalui regulasi.

Bagi entitas-entitas bisnis, tuntutan ini menunjukkan implikasi pada adanya tanggung jawab yang lebih luas. Entitas bisnis dituntut untuk mampu menjalankan aktivitas-aktivitas bisnis sesuai dengan sasaran yang ditetapkan dalam agenda *sustainability*. Grafik 1.1 menunjukkan saat ini pengungkapan CSR di perusahaan perbankan telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan baik di negara maju maupun di negara berkembang. Perkembangan ini antara lain dapat dilihat dari semakin banyaknya perusahaan yang melakukan praktik *sustainability report*, yang kemudian mendorong para ilmuwan akuntansi baik di luar negeri maupun di Indonesia untuk melakukan penelitian yang berfokus pada Akuntansi Sosial dan Lingkungan pada sektor perbankan.

Perbankan merupakan salah satu tonggak perekonomian, karena bank memiliki peran penting dalam usaha penyaluran dana untuk berbagai kepentingan yang secara langsung berhubungan dengan berbagai komunitas lingkungan masyarakat (Djogo, 2005). Hubungan dengan komunitas ini akan memiliki dampak, bank diharuskan tidak hanya menjalankan tugasnya dalam bidang perbankan, namun wajib memberikan bukti kepedulian terhadap komunitas yang secara langsung berhubungan dengan kegiatan operasinya. Salah satu bentuk kepedulian tersebut adalah program tanggungjawab sosial perusahaan.

Gambar 1.1 Grafik Pengungkapan CSR Perbankan



Sumber : *Business Research*, 2014

Pelaksanaan kinerja sosial dan lingkungan perusahaan tidak hanya wajib untuk perusahaan industri yang menghasilkan dampak negatif secara langsung pada lingkungan dan masyarakat, tetapi sektor-sektor lain seperti jasa, asuransi, komunikasi, lembaga keuangan bank dan bukan bank. Tanggungjawab sosial perusahaan bank dapat ditunjukkan dengan kepedulian kepada masyarakat sekitar atau relasi komunitas, yang dapat diartikan sebagai peningkatan partisipasi dan posisi organisasi di dalam sebuah komunitas melalui berbagai upaya kemaslahatan bersama bagi organisasi dan komunitas (Bank Indonesia, 2012).

Tanggungjawab sosial perusahaan akan menjadi suatu keharusan kelak menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau *ASEAN Economic Community* (AEC) di tahun 2015-2020 mendatang. MEA merupakan wujud dari integrasi perekonomian di antara negara-negara anggota ASEAN dengan tujuan tercapainya pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing kawasan ASEAN secara keseluruhan di pasar dunia. Dalam MEA kelak, Kawasan ASEAN akan menjadi pasar tunggal berbasis produksi tunggal dimana arus barang, jasa,

investasi, dan tenaga kerja terampil akan lebih bebas di dalam kawasan ASEAN (Direktorat Jendral Kerja Sama Perdagangan Internasional, 2014). Hal ini merupakan tantangan bagi bisnis dalam negeri. Tantangan ini mengharuskan bisnis di dalam negeri untuk mampu lebih efisien agar dapat bertahan, bersaing dan unggul di dalam MEA. Untuk dapat menjawab tantangan tersebut implementasi tanggungjawab sosial perusahaan merupakan keharusan bagi semua bisnis.

MEA sebagai pasar tunggal menuntut liberalisasi sektor jasa, termasuk jasa perbankan. Liberalisasi jasa perbankan berbeda dengan liberalisasi sektor perdagangan dan sektor jasa lainnya. Sektor perbankan merupakan industri yang berbasis kepercayaan dan kiprahnya akan sangat mempengaruhi stabilitas keuangan kawasan ASEAN karena hampir disemua negara ASEAN sektor keuangannya masih didominasi oleh sektor perbankan (Bank Indonesia, 2012). Oleh karena itu proses liberalisasi perbankan tidak hanya berbicara mengenai kinerja keuangan saja tetapi juga harus memperhatikan kesiapan keberlangsungan perusahaan (*sustainability report*) guna menjamin perusahaan bisa tumbuh berkesinambungan dalam jangka panjang.

Saat ini banyak perusahaan multinasional baik yang bergerak di bidang manufaktur, perdagangan, jasa hingga organisasi pemerintahan mengumumkan *corporate social performance* beserta dampak yang ditimbulkannya terhadap ekonomi, sosial dan lingkungannya dalam sebuah *sustainability report*. Perusahaan-perusahaan besar dunia seperti *Procter and Gamble*, *UPS*, *Unilever*, *Carrefour*, *Freeport* saat ini menyusun *sustainability report* menggunakan kerangka yang dikembangkan oleh *Global Reporting Initiative* (selanjutnya disebut GRI), sedangkan dari organisasi pemerintah contohnya ialah *UK Government*, *US Environment Agencies*, *Japan Environment Agencies* (Massie, 2001).

Pedoman *sustainability report* oleh GRI sudah digunakan di seluruh dunia dan lebih dari 1000 perusahaan dan entitas telah membuat laporan GRI (Sukoharsono, 2009). Langkah serupa juga dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia di tahun 2014 tercatat sudah lebih dari 60 perusahaan yang membuat *sustainability report* yang mengacu pada GRI dan berani bertanding dalam *Indonesian Sustainability Report Awards* (ISRA), (www.sra.ncsr-id.org).

Sebagai bentuk apresiasi terhadap perusahaan yang telah menyelenggarakan laporan berkelanjutan (*sustainability report*), baik yang diterbitkan secara terpisah maupun terintegrasi dalam laporan tahunan (*annual report*), pada tahun 2005 Ikatan Akuntan Indonesia dan *National Center for Sustainability Reporting* (NCSR), yang beranggotakan *Indonesian-Netherlands Association* (INA), *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI), Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) dan Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) mengadakan sebuah *event* penghargaan *Indonesia Sustainability Reporting Award* (ISRA), diharapkan dapat memacu perusahaan untuk berlomba-lomba menyelenggarakan *sustainability report*.

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. termasuk salah satu nominator dari 24 nominator dalam ISRA 2010. PT. Bank BNI juga pernah meraih *Commendation for First Time Sustainability Reporting 2010*, *Winner Best Sustainability Reporting 2013*, *Winner Best Sustainability Reporting 2014 category financial services* (www.sra.ncsr-id.org).

PT. Malayan Banking Berhad (Maybank) asal Malaysia juga telah mempublikasikan *sustainability report* nya secara terpisah sejak tahun 2010. Maybank termasuk salah satu nominator yang meraih *Best First Time Reporter Sustainability 2010*, *Best Work Place Practices 2011*, *Best Sustainability Report*

2012, *Best Sustainability Report 2013* dan *Best Sustainability Report 2014* di ajang *ACCA Malaysia Sustainability Reporting Awards* (www.accaglobal.com).

Menurut Moneva *et al.* (2006) standar GRI memang dirancang sebagai panduan bagi entitas bisnis untuk memenuhi tuntutan bagi tercapainya sasaran *sustainability*, namun praktik-praktik tersebut belum mendapat respon sebagaimana mestinya. Secara kuantitas, entitas-entitas bisnis yang mengomunikasikan laporan kinerja *sustainability* memang meningkat, tetapi dampaknya terhadap upaya-upaya pencapaian sasaran agenda *sustainable development* ternyata belum memadai (Sherman dan DiGuilio, 2010). Dua potret bertentangan ini mencerminkan adanya kesenjangan antara spirit yang terkandung dalam *sustainability* dengan bagaimana spirit tersebut dimaknai dan dipraktikkan oleh entitas bisnis. Kesenjangan ini merupakan petunjuk yang jelas bahwa masih diperlukan jalan panjang untuk dapat sampai pada tingkatan diadopsinya spirit tersebut secara benar oleh pelaku bisnis.

Jawaban terhadap kesenjangan tersebut harus diupayakan sesegera mungkin untuk memastikan diadopsinya spirit *sustainability* secara sungguh-sungguh sehingga entitas bisnis dapat memberikan kontribusi bagi terjaminnya masa depan dunia yang lebih baik. Hal yang perlu digarisbawahi ialah, bagaimana penerapan *sustainability report* - Apakah perusahaan menerapkan secara parsial ataukah secara keseluruhan? Hal tersebut masih menjadi isu yang rumit, karena kerangka GRI merupakan sistem sukarela dalam artian tidak harus *saklek* (Mudd, 2008). Di Indonesia, standarisasi khusus pelaporan CSR untuk perbankan juga belum diatur, sehingga model pelaporan dapat berbagai macam bentuk. Kurangnya standar atau pedoman, bersamaan dengan adanya ketidakpastian kepada siapa *disclosure* itu ditujukan, membuat pelaporan isu *sustainability report* itu sangat bervariasi. Maka dari itu perlu adanya pedoman yang jelas dalam pelaporan lingkungan serta secara jelas siapa pemakainya.

Hal inilah yang menarik minat penulis untuk menganalisis sejauh mana perusahaan perbankan di Indonesia menerapkan pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan (*sustainability report*) dibandingkan dengan penerapan pengungkapan *sustainability report* di negara ASEAN lainnya guna menyongsong MEA, dengan judul “Analisis Konten dan Komparatif Sustainability Report berdasarkan Standar GRI G4 (Studi kasus pada *Sustainability Report* Bank BNI dan Maybank Tahun 2014) ”.

1.2. Motivasi Penelitian

Terdapat berbagai faktor yang mendorong perusahaan untuk melakukan penyajian informasi sosial dan lingkungan dalam laporan tahunan maupun dalam laporan sosial terpisah yang disebut sebagai *sustainability report*. Menurut Yuliana (2008: 3), terdapat tiga alasan yang memotivasi perusahaan melakukan praktik *sustainability report*. Pertama, sebagai strategi perusahaan yang pada akhirnya mendatangkan keuntungan (*non compliance*). Kedua, sebagai bentuk kewajiban (*in compliance*) karena ada peraturan yang memaksa penerapannya. Ketiga, sebagai wujud kesadaran (*beyond compliance*) karena perusahaan merasa menjadi bagian dari komunitas. Terlepas dari ketiga alasan tersebut, sudah selayaknya perusahaan melaporkan dampak sosial dan lingkungan yang timbul sebagai konsekuensi dari aktivitas bisnisnya dengan penuh kesadaran dan kesungguhan, bukan semata-mata untuk menjaga citra. Sementara itu, menurut beberapa literatur, motivasi yang mendasari perusahaan melakukan praktik *sustainability report* juga seringkali didasarkan pada teori-teori, antara lain adalah *legitimacy theory* dan *stakeholder theory* (Parsa dan Kouhy, 2002).

Dalam *Legitimacy theory* mengandung makna harus ada kesesuaian antara tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan nilai-nilai atau norma-norma yang dipegang oleh masyarakat dimana perusahaan tersebut beroperasi. *Legitimacy theory* memprediksi bahwa perusahaan akan

melakukan tindakan apapun yang dipandang perlu dalam rangka mempertahankan reputasinya (*image*). Setelah adanya penerimaan dari masyarakat (legitimasi) maka diharapkan akan meningkatkan nilai perusahaan sehingga akan meningkatkan *image* perusahaan dan mempengaruhi penjualan sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan. Hal inilah yang membuat program tanggung jawab sosial perusahaan entitas bank meningkat dari tahun ke tahun.

Dalam *stakeholder theory*, suatu perusahaan tidak akan dapat berdiri sendiri tanpa adanya interaksi sosial dengan stakeholder serta masyarakat disekitarnya. Salah satu cara perusahaan melakukan interaksi sosial adalah dengan menerbitkan laporan tahunan dan *sustainability report* yang merupakan produk dari praktik *sustainability report*. Peneliti memandang bahwa analisis konten dan komparatif dapat memenuhi persyaratan untuk memahami realitas “*sustainability*” dalam konteks penelitian ini, karena bahasa diyakini dapat menjelaskan komunikasi ditinjau dari *sustainability report*.

1.3. Fokus Penelitian

Isu CSR pun kemudian semakin merebak yang menuntut agar perusahaan mengarahkan perhatiannya pada realitas “*sustainability*” sebagai landasan konsep pembangunan berkelanjutan dalam rangka menciptakan hubungan yang harmonis antara pemerintah, dunia usaha, dan stakeholder serta masyarakat (Ambadar, 2008:31). Secara ideal, perusahaan hendaknya mengintegrasikan CSR secara keberlanjutan (*sustainable*) dalam kebijakan perusahaan yang merupakan investasi masa depan perusahaan, bukan hanya sekedar dianggap sebagai biaya sosial (*social cost*). Berdasarkan pemaparan tersebut, maka penelitian ini akan berfokus pada upaya pemahaman mengenai realitas “*sustainability*” yang terefleksi dalam praktik *sustainability report* pada perusahaan sektor perbankan di kawasan ASEAN.

Adapun alasan dipilihnya sektor perbankan adalah karena bank merupakan salah satu tonggak perekonomian, bank memiliki peran penting dalam usaha penyaluran dana untuk berbagai kepentingan yang secara langsung berhubungan dengan berbagai komunitas lingkungan masyarakat (Djogo, 2005). Hubungan dengan komunitas ini akan memiliki dampak, bank diharuskan tidak hanya menjalankan tugasnya dalam bidang perbankan, namun wajib memberikan bukti kepedulian terhadap komunitas yang secara langsung berhubungan dengan kegiatan operasinya. Salah satu bentuk kepedulian tersebut adalah program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Di dalam proses penelitian, Peneliti akan menggunakan metode *content analysis* dan mencoba membandingkan pelaksanaan dan pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan antara Bank BNI dan Maybank dalam melaporkan *sustainability report*. Dalam proses analisis data, tentu saja untuk menilai pengungkapan elemen-elemen dalam *sustainability report* memerlukan acuan, maka acuan yang digunakan adalah acuan dari GRI G4. Masing-masing indikator kinerja yang telah dibuat oleh perusahaan berdasarkan GRI G4 akan diberikan skor berdasarkan ada atau tidaknya indikator kinerja yang telah diungkapkan.

1.4. Masalah Penelitian

Berdasarkan pada pembahasan latar belakang masalah tersebut di atas, maka pokok masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan dan pengungkapan *sustainability report* yang dilakukan PT. Bank BNI dan Maybank tahun 2014 berdasarkan standar GRI G4 ?
2. Bagaimana hasil perbandingan penerapan dan pengungkapan *sustainability report* yang dilakukan antara PT. Bank BNI dengan

Maybank dalam hal pengungkapan *sustainability report* tahun 2014 berdasarkan standar GRI G4 ?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis:

1. Penerapan dan pengungkapan *sustainability report* yang dilakukan PT. Bank BNI dan Maybank tahun 2014 berdasarkan standar GRI G4.
2. Perbandingan penerapan dan pengungkapan *sustainability report* yang dilakukan antara PT. Bank BNI dengan Maybank dalam hal pengungkapan *sustainability report* tahun 2014 berdasarkan standar GRI G4.

1.6. Kontribusi Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini diharapkan :

1.6.1. Kontribusi Teori

Penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas dalam pengembangan penelitian di bidang akuntansi sosial dan lingkungan. Penelitian akuntansi sosial dan lingkungan di industri perbankan masih sedikit sehingga perlu diadakannya penelitian yang lebih mendalam tentang akuntansi lingkungan dan pengungkapannya. Selama ini pengungkapan akuntansi sosial dan lingkungan hanya terdapat di laporan manajemen dan hanya berupa biaya lingkungan yang tidak jarang hanya disebut sebagai biaya *overhead* tanpa ada rincian di dalamnya sehingga tidak transparan. Dengan adanya pengetahuan mengenai kualitas penerapan *sustainability report* di industri perbankan, diharapkan mampu memberikan pandangan baru bahwa akuntansi sosial dan lingkungan

tidak hanya diperuntukkan kepada perusahaan yang berhubungan langsung dengan alam, tetapi juga untuk semua bidang industri.

1.6.2. Kontribusi Praktik

Penelitian ini dapat memberikan informasi dan deskripsi mengenai implementasi akuntansi sosial dan lingkungan yang masih jarang diungkapkan di industri perbankan. Dengan penelitian ini manfaat dapat diperoleh bagi industri perbankan dalam mengungkapkan akuntansi sosial dan lingkungan dalam laporan *sustainability report*-nya demi memenuhi regulasi yang telah ditetapkan pemerintah, khususnya dalam pemenuhan indikator aspek material dalam standar GRI G4. Indikator aspek material ini merupakan inti dari laporan pertanggungjawaban akuntansi sosial dan lingkungan, di dalam indikator aspek material ini mengandung aspek ekonomi, lingkungan dan sosial. Industri perbankan diharapkan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya tidak hanya kepada pemerintah, tetapi juga kepada masyarakat dan lingkungan alam.

1.6.3. Kontribusi Kebijakan

Kontribusi kebijakan ditujukan bagi pihak-pihak yang memiliki wewenang dalam membuat regulasi. Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan mengenai kualitas penerapan *sustainability report* perusahaan. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan regulator dalam mengambil tindak lanjut untuk membuat regulasi, sehingga perusahaan tidak hanya melaporkan tetapi juga memberikan *assurance* bahwa laporan yang telah dibuat adalah sesuai dengan kenyataan.